

# MEMBANGUN PAPUA DENGAN FORMULASI TRADISI LISAN

*Jonner Sianipar*

## Abstract

*Each tribe at Papua is ensured have oral tradition by itself. The oral tradition misses fire by itself. Even, oral tradition comes into the world as expression of society dynamics with moral values, norm, manner, and local character. Those values as society identity, as well in internal community and also external. Papuan oral tradition will more effective if it shaped in a grand design or scheme outgrows arranged by comprehensive and permanent for development formulation at Papua Province.*

Kata-kata kunci: tradisi lisan, formulasi, pembangunan, dan budaya.

## 1. Pendahuluan

Suka atau tidak, Papua masih sering dijuluki sebagai daerah tertinggal dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Ketertinggalan Papua ditengarai oleh berbagai alasan. Alasan paling klasik adalah letak Papua yang terjauh dari pemerintah pusat dan pusat-pusat industri di Pulau Jawa, yang kemudian dikaitkan dengan tingginya biaya pembangunan dan biaya hidup di Papua. Topografi Papua yang didominasi perbukitan, pegunungan, lembah-lembah, dan sungai-sungai juga dijadikan alasan. Pernah juga mencuat alasan sumber daya manusia (SDM) lokal yang belum siap menghadapi tantangan global. Akibatnya, di beberapa sektor digantikan oleh SDM dari luar Papua dengan itikad baik dan niat tulus untuk membangun Papua. Alasan paling krusial adalah politis. Politik di Papua memang selalu menjadi komoditas perbincangan di kalangan tertentu di dalam dan di luar negeri. "Fluktuasi" politik itu tentu sangat memengaruhi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Papua. Meskipun demikian, pembangunan di Papua yang sudah dicapai harus dihargai dan didukung sambil terus diawasi oleh masyarakat agar dapat berjalan berimbang di segala bidang. Pembangunan yang berimbang di segala bidang mungkin sudah berjalan sesuai dengan perencanaan. Tidak hanya itu, pembangunan karakter dan moral masyarakat bangsa hingga saat ini secara nasional masih timpang.

Pemerintahan di semua daerah hingga saat ini tidak memiliki konsep baku yang permanen dan berkekuatan hukum dalam hal pembangunan karakter dan moral masyarakat bangsa. Karakter dan moral bangsa seolah dibiarkan berkembang sendiri tanpa rumusan yang terpolah dan jelas sehingga perkembangannya semakin jauh dari karakter dan moral keindonesiaan yang berlandaskan Pancasila. Akibatnya, pembangunan yang direncanakan dan dilakukan sering menimbulkan berbagai masalah. Masalah yang sangat krusial saat ini adalah anarkisme dan korupsi. Ironisnya, hak azasi manusia (HAM) menjadi faktor penghambat dalam menyelesaikan kasus-kasus anarkisme. Di satu sisi, anarkisme merupakan perbuatan yang melanggar HAM. Di sisi lain, isu doktrin HAM menjadi penghalang bagi aparat keamanan untuk menangani anarkisme secara proporsional. HAM bukan hanya milik masyarakat sipil, melainkan

juga milik semua elemen masyarakat termasuk anggota masyarakat yang kebetulan berada dalam satuan-satuan organik lembaga pemerintah atau negara.

Dalam hal memberangus tabiat dan perilaku korupsi justru menimbulkan masalah turunan yang lebih rumit dan kompleks, bahkan sering bernuansa politis. Akibatnya, upaya-upaya hukum yang dilakukan lebih menjadi retorika hukum daripada penyelesaian hukum secara proporsional. Kedua contoh kasus di atas menggambarkan kelemahan dan ketidaksiapan rumusan hukum positif yang berlaku di negara kita. Hukum positif yang berlaku saat ini terasa kaku dan tidak mampu mengikuti dinamika pembangunan yang selalu diikuti oleh keragaman masalah. Contoh kelemahan hukum seperti di atas seharusnya menjadi inspirasi bagi pemerintah dan juga bagi masyarakat untuk membenahi berbagai aspek masalah yang akan selalu timbul akibat pembangunan dan perkembangan zaman.

Terlepas dari carut-marut masalah yang timbul akibat lemahnya hukum positif tersebut, pembahasan ini ditekankan pada masalah yang timbul karena pembangunan itu sendiri. Di Papua saat ini belum timbul masalah sekompleks yang terjadi di daerah lain, seperti di Pulau Jawa. Keadaan "steril" ini seharusnya dijadikan oleh pemerintah daerah sebagai momentum untuk mempersiapkan berbagai hal sebagai penangkal, pelapis, atau pencegah dini terjadinya berbagai masalah yang kompleks dan "berkualitas" seperti yang dialami oleh berbagai daerah di luar Papua. Belajar dari pengalaman berbagai daerah lain di Indonesia, pemerintah daerah di Papua seharusnya mulai mempersiapkan berbagai perangkat yang dapat menapis dan mencegah secara dini berbagai masalah yang mungkin timbul sebagai eksek negatif dari pembangunan yang sudah dan masih akan terus dilaksanakan.

Pembangunan pusat perbelanjaan modern secara konkret menunjukkan geliat pembangunan fisik sebuah kota. Demikian halnya dengan pembangunan infrastruktur lain seperti gedung-gedung perkantoran, hotel, sekolah atau universitas, jalan, jembatan, dan sebagainya. Pembangunan fisik terlihat ibarat sulap yang mengubah sebuah desa atau kota kecil dan sederhana menjadi sebuah kota modern. Akan tetapi, pembangunan pusat perbelanjaan modern misalnya, akan menjadi masalah apabila masyarakat tidak membekali diri atau tidak dibekali dengan kearifan-kearifan individu dalam mengelola keuangan, demikian juga untuk keluarga-keluarga.

Tiadaanya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan keuangan akan menyuburkan budaya konsumtif, membeli barang yang tidak penting atau belum diperlukan. Pola hidup yang konsumtif akan mengakibatkan kebangkrutan individu dan kebangkrutan keluarga-keluarga, serta akumulasinya dapat berakibat kebangkrutan sosial. Masalah tidak akan berhenti pada kebangkrutan sosial saja. Dampak-dampak susulan akan muncul berupa kerusakan moral sosial. Masyarakat akan mengambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai masyarakat kota yang modern dengan mengorbankan moral. Di kalangan tertentu akan subur budaya korupsi. Demikian masalah sosial itu terus meluas dan semakin "berkualitas" yang memicu ketimpangan sosial, kecemburuan sosial, pergesekan sosial, dan yang mengusik rasa aman. Pada kondisi tertentu, akumulasi dari kondisi-kondisi sosial yang buruk itu, dapat menimbulkan berbagai konflik dengan berbagai alasan yang saling membenarkan individu atau kelompok sendiri. Konflik yang paling krusial adalah konflik horizontal

yang jika terjadi butuh waktu yang cukup lama untuk memulihkannya. Jika kondisi buruk semacam itu terjadi, maka pembangunan akan terhambat.

Dinamika pembangunan di Indonesia selalu menunjukkan adanya dampak negatif terhadap masyarakat sebagai sasaran pembangunan. Pembangunan infrastruktur, sadar atau tidak, akan mengubah struktur lingkungan hidup. Pembangunan sebuah kompleks perumahan, misalnya, akan menggeser fungsi-fungsi lahan kosong yang peruntukannya menjaga dan mempertahankan keseimbangan alam lingkungan dan daur hidup ekosistem di dalamnya. Banyak contoh lain dari pembangunan yang berdampak buruk terhadap masyarakat dan lingkungan yang disebabkan tiadanya alat pelapis untuk menangkal dampak buruk pembangunan itu. Kita bukan berarti menolak pembangunan, melainkan terus-menerus mendukungnya sesuai dengan cita-cita bersama untuk mencapai kehidupan yang lebih berkualitas. Akan tetapi, kita perlu memiliki landasan yang kokoh untuk menopang eksekusi pembangunan sehingga kehidupan berkualitas yang kita capai tidak hanya dalam aspek teknologi, melainkan pembangunan akal budi yang berkualitas.

Selama ini pembangunan fisik atau infrastruktur mungkin telah ditopang oleh ketentuan hukum tentang pengelolaan tata ruang yang didahului oleh analisis dampak lingkungan, meskipun penerapannya tidak selalu konsisten. Formula yang sudah ada masih sebatas produk teknologi dari pemikiran kaum teknokrat. Sebaliknya, analisis dampak moral, mentalitas, spiritual, karakter, norma, dan etika bermasyarakat bangsa belum dimiliki secara terkonsep, permanen, dan terpolakan sebagai bentuk formulasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Sumber analisis untuk formulasi itu adalah masyarakat lokal sebagai pemangku budaya lokal yang di dalamnya terkandung pencitraan karakter dan nilai-nilai budaya lokal sebagai tuntunan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemerintah Papua sudah seharusnya memikirkan dan melakukan langkah-langkah nyata penggalian terhadap budaya lokal sebagai sumber aturan, ketentuan, bahkan hukum yang akan dituangkan dalam peraturan-peraturan daerah sebagai landasan dan kerangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dan masyarakat Papua. Untuk itu, perlu dilibatkan kalangan intelektual terkait bersama dengan tokoh-tokoh dari berbagai elemen masyarakat untuk merumuskan rancangan peraturan pemerintah daerah (Ranperda) yang bermuatan budaya lokal, kecerdasan lokal, karakter lokal, dan berbagai lokalitas lain dalam penyusunan perencanaan dan program-program pembangunan di daerah Papua. Sebaliknya, para intelektual dan tokoh-tokoh dari berbagai elemen terkait, khususnya budayawan Papua seharusnya merumuskan konsep yang bersumber dari berbagai nilai lokalitas Papua untuk diajukan atau diusulkan kepada pemerintah (eksekutif dan legislatif) untuk dijadikan formula perencanaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Papua. Pemerintah tampaknya tidak memiliki cukup niat, iktikad, atau kecerdasan untuk melihat potensi lokalitas sebagai landasan dan inspirasi pembangunan di wilayahnya. Pemerintah Papua harus didorong untuk mau belajar dari pengalaman pemerintah daerah lain di luar Papua. Oleh karena itu, kalangan intelektual, budayawan, dan tokoh-tokoh terkaitlah yang seharusnya memulai merumuskan nilai-nilai lokalitas Papua dan memformulasikannya sebagai landasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Papua.

## 2. Tradisi Lisan sebagai Sumber Formulasi Pembangunan Papua

Tradisi lisan meliputi sastra lisan, nyanyian rakyat, permainan rakyat, pakaian tradisional, kesenian rakyat, dan sebagainya. Sastra lisan meliputi cerita rakyat, puisi rakyat, pantun tradisional, teka-teki rakyat, anekdot (*mop*) rakyat, dan sebagainya. Mengingat banyaknya suku bangsa di Papua, tradisi lisan Papua pun tidak terhitung banyaknya. Setiap suku di Papua dipastikan memiliki tradisi lisan sendiri. Tradisi lisan itu tentu tidak muncul dengan sendirinya dan bukan sebagai lipstik semata yang hanya memperindah kreativitas budaya kesukuannya. Tradisi lisan lahir sebagai ekspresi dinamika masyarakat yang memiliki nilai-nilai moral, norma, etika, dan karakter lokal. Nilai-nilai itu menjadi identitas masyarakat dan suluh dalam interaksinya, baik dalam komunitas internal maupun eksternal.

Sebuah unsur tradisi lisan tidak sekaligus memuat berbagai nilai moral. Nilai-nilai moral yang beragam itu terkandung dalam berbagai unsur tradisi lisan yang beragam pula. Artinya, untuk menemukan nilai-nilai moral suatu komunitas masyarakat atau suku, harus terlebih dahulu mempelajari berbagai tradisi lisan yang dimilikinya. Salah satu contoh adalah tradisi lisan *munaba* pada masyarakat Waropen yang pernah diteliti oleh Prof. Dharmojo dari Universitas Cenderawasih, Jayapura, Papua. Penelitiannya mengungkapkan bahwa tradisi lisan *munaba* merupakan syair-syair ratapan dalam ritual kematian kalangan *sera* atau raja dalam masyarakat Waropen di Papua. *Munaba* sangat bernada pilu sebagai syair ratapan yang mengandung kesedihan mendalam karena kematian seseorang yang sangat dihormati dan dikasihani. *Munaba* adalah senandung ratapan sebagai wujud penghormatan terakhir kepada mendiang yang dapat dianalogikan sebagai ritual penghormatan militer kepada seseorang yang dianggap pahlawan. Dalam senandung *munaba* dipaparkan tentang kehormatan, kebesaran, kebaikan, kearifan, jasa-jasa, dan berbagai keteladanan si mendiang pada masa hidupnya. *Munaba* bertujuan agar arwah si mendiang kukuh kedudukannya di alam roh (Dharmojo, 2005:1); meskipun kematian dianggap bukanlah akhir dari kehidupan melainkan awal bahkan kelanjutan kehidupan dalam bentuk lain yang belum jelas (Held terjemahan Dharmojo, 2006:251). Nilai-nilai moral dalam *munaba* tentu tidak akan terungkap saat ini jikalau tidak ada niat dan kemauan untuk menggali serta mempelajari tradisi lisan masyarakat Waropen seperti yang dilakukan oleh Dharmojo dan juga Held.

Ilustrasi tentang *munaba* di Waropen memberi pesan bahwa pada masa hidupnya, setiap orang hendaknya, bahkan mutlak, berbuat kebaikan dan kebajikan yang menjadi teladan bagi masyarakat luas. Maka, kematiannya kelak akan menjadi momentum kehilangan sosok anutan moral bagi masyarakat luas yang akan ditangani dengan pilu dan duka yang mendalam. Jika sebaliknya, maka kematiannya akan menjadi akhir penantian yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat.

Keteladanan tidak hanya dapat ditunjukkan oleh kedudukan atau kekuasaan seseorang, melainkan dapat dilakukan oleh setiap orang dalam kapasitas sosialnya masing-masing. Paling tidak, keteladanan dapat ditunjukkan dengan kebiasaan mengedepankan nurani dan akal budi yang dengan sendirinya akan menjauhi sifat dan perilaku tidak terpuji. Pesan dalam *munaba* Waropen selain perlu diteladani oleh masyarakat luas, juga sangat relevan diadopsi oleh kalangan pemimpin dalam pemerintahan, dengan menunjukkan keteladanan kepada warganya, bukan

mempertontonkan perilaku yang tidak terpuji.

*Munaba* Waropen hanya satu contoh yang dapat dijadikan inspirasi oleh semua kelas sosial di Papua untuk berlomba-lomba berbuat kebajikan dalam membangun kehidupan individu dan kehidupan bermasyarakat. Khusus untuk kalangan penyelenggara dan pemimpin pembangunan di Papua, *munaba* Waropen dan/atau “*munaba-munaba*” suku lainnya di Papua dapat diadopsi sebagai inspirasi moral kepemimpinannya sehingga kematiannya kelak tidak dijadikan histeria euforia, melainkan akan ditangisi dan disesali setara dengan kematian seorang pahlawan yang sangat dihormati dan dicintai oleh masyarakatnya.

Tradisi lisan Papua tidak niscaya mampu menggugah dan membentuk nurani, akhlak, akal budi, dan moral masyarakat. Akan tetapi, akan lebih efektif jika tradisi lisan diformat dalam suatu *grand design* atau skema besar yang disusun secara komprehensif dan permanen untuk dijadikan formula pembangunan di Papua.

### 3. Formulasi Sastra dalam Pembangunan Papua

Perkembangan ilmu-pengetahuan-saat-ini tampak timpang ketika bidang teknologi melesat jauh meninggalkan bidang kesastraan. Nilai ekonomi produk teknologi selalu terdepan dibandingkan produk kesastraan. Hal itu disebabkan oleh pola atau budaya hidup manusia yang secara ekstrem selalu diukur dengan nilai ekonomi. Pemenuhan kebutuhan akhlak dan nurani, walaupun sering menjadi topik bahasan, selalu terabaikan dan akhirnya hanya tinggal retorika. Tampaknya, kondisi seperti ini masih akan terus berlangsung. Negara berkembang seperti Indonesia seharusnya lebih peka melihat ketimpangan seperti itu sehingga dapat lebih dini menciptakan suatu formula pembangunan yang mengutamakan moral dan akal budi; bukannya negara, yang seharusnya berperan memajukan bidang kesastraan, justru terseret oleh arus teknologi di bawah tekanan ekonomi dan politik di tengah program-program pembangunan yang dilakukan. Akibatnya, kemajuan pembangunan oleh negara tidak berjalan seimbang dengan pembangunan akhlak masyarakat. Pembangunan itu bahkan tidak sedikit yang menimbulkan dampak merusak dan merugikan akhlak atau moral masyarakat. Sampai kapan dunia kesastraan dapat memberikan formula untuk pembangunan di Indonesia?

Ketika teknologi belum berkembang, sastra merupakan kebutuhan penting masyarakat lama. Karya-karya sastra dihasilkan oleh para pujangga. Mereka bekerja untuk raja dengan menghasilkan karya-karya sastra, walaupun dengan “teknologi” tulisan yang sangat sederhana, namun dapat mengasah atau membangun akhlak dan budi pekerti masyarakat. Karya sastra itu diciptakan dengan merefleksikan kondisi masyarakat pada masanya. Karya sastra itu kemudian dikembalikan kepada masyarakat melalui para juru tutur atau pemimpin-pemimpin kelompok masyarakat. Karya-karya sastra yang dihasilkan menjadi pedoman filosofi bagi raja dalam memerintah rakyat negerinya, sedangkan bagi masyarakat, produk-produk sastra itu menjadi kontrol internal dan perenungan dalam menjalankan darma baktinya kepada negeri dan sang raja. Sastra, dengan demikian menjadi alat bagi sang raja dalam memimpin negerinya dan menjadi pedoman bagi masyarakat dalam interaksi sosial sebagai warga negeri. Sastra menjadi perangkat pembangunan untuk menyampaikan pesan-pesan moral, etika, hukum, dan kehormatan di seluruh wilayah negeri.

Di masa Hayamwuruk memerintah Majapahit, Mpu Prapanca telah menulis kitab

*Nagarakertagama* tahun 1365. Kita tahu, Majapahit adalah negara kerajaan yang merupakan cikal bakal Indonesia. Atas titah Raja Hayamwuruk, pujangga Mpu Prapanca menuliskan dalam kitab *Nagarakertagama*, bahwa Papua merupakan daerah Majapahit Ke-Delapan setelah (1) Sumatera; (2) Jawa dan Madura; (3) Kepulauan Nusa Tenggara; (4) Kalimantan; (5) Sulawesi; (6) Kepulauan Maluku dan Amboina; dan (7) Semenanjung Malaka (Kern, 1919; dan Bachtiar dalam Koentjaraningrat, dkk. 1994:44-45).

Di antara sejumlah nama daerah lainnya yang terletak di bagian timur Kepulauan Indonesia disebut Wwanin, Sran, dan Timur. Wwanin, menurut para ahli Jawa Kuno, adalah nama lain untuk daerah Onin, sedang Sran adalah nama lain untuk daerah Kowiai, kedua-duanya di Irian. 'Timur' mungkin pula nama lain untuk daerah bagian timur Irian Jaya. Tidaklah dapat disangkal bahwa beberapa daerah di Irian Jaya dalam abad ke-14 dianggap merupakan bagian dari wilayah kedaulatan negara-nusa Majapahit (Yamin 1953: hlm. 47-55; dan Bachtiar dalam Koentjaraningrat, dkk., 1994:44-45).

Siapa menyangka bahwa *Nagarakertagama* menjadi dokumen sejarah yang sangat penting mengenai kedaulatan Papua (dahulu Irian Barat) sebagai bagian dari NKRI?

Kita juga mendengar tentang "Gurindam XII" karangan Raja Ali Haji yang ditulis ketika ia berusia 38 tahun. Gurindam sebagai jenis puisi lama asli Indonesia terdiri atas beberapa baris dalam satu bait yang dikemas berbentuk pantun. Isinya berupa pengajaran dan nasihat. Gurindam XII ditulis di Pulau Penyengat, Riau, tahun 1847 (1263 H). Pada masa itu, gurindam dijadikan norma hidup. Saat ini pun para tetua Melayu di pesisir Riau masih menjadikan gurindam sebagai inspirasi kontrol diri dan kontrol sosial masyarakat.

Saat angkatan Balai Pustaka (1920-1933) muncul pula novel *Sitti Nurbaya* (1922) yang merupakan buah intelektualitas Marah Rusli yang mendobrak doktrin kawin paksa dalam masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Jika bukan karena *Sitti Nurbaya*, maka belum tentu kaum muda Minangkabau saat ini bebas memilih jodohnya. Demikian juga novel *Penakluk Ujung Dunia* (1988) karangan Bokor Hutusuhut, seorang sastrawan Batak terkemuka dari Sumatera Utara. Novel ini tidak hanya menginspirasi orang Batak untuk mencerahkan kehidupannya meninggalkan tanah Batak di kawasan Danau Toba dengan merantau untuk "menaklukkan ujung dunia", melainkan juga menjadi inspirasi untuk meninggalkan doktrin adat-istiadat yang tertutup terhadap kemajuan, termasuk meninggalkan sistem perbudakan dan kepercayaan pada berhala yang pernah berlangsung lama dalam tatanan dan kepercayaan masyarakat Batak.

Papua yang masih "polos" dan "hijau" juga memiliki beberapa karya sastra yang dapat dibanggakan, baik sastra modern maupun sastra lisan. Novel *Namaku Teweraut* (2000) karangan Ani Sekarningsih seharusnya menginspirasi setiap perempuan Papua untuk bangkit menaikkan harkat kaumnya, membangun generasi yang dilahirkannya menjadi angkatan yang lebih cerdas dan bermartabat, dengan berani mendobrak otoritas kaum pria yang memegang kekuasaan tertinggi dalam tatanan masyarakat suku-suku tertentu di Papua. *Namaku Teweraut* menjadi contoh karya sastra nasional dari Papua yang berusaha membangun harkat kemanusiaan kaum perempuan Papua, khususnya perempuan Asmat yang menjadi latar cerita.

Masyarakat Sorong di kawasan "Kepala Burung" Papua pun, melalui cerita rakyat *Terjadinya Sungai Koboi di Teminabuan, Sorong*, menginspirasi kita untuk menjaga

lingkungan hidup dan sejak dini mencegah terjadinya bencana bagi masyarakat luas. Nenek moyang kita seolah ber-reinkarnasi dalam sosok dua tokoh penting dalam cerita itu, yakni Sarwanik dan Salfale. Melalui tokoh Sarwanik, nenek moyang kita telah berpesan agar kita tidak boleh merusak tanaman di sekitar sumber-sumber mata air, sebab hal itu kelak dapat menimbulkan banjir yang merugikan nyawa dan harta benda. Melalui tokoh Salfale, kita mendapat gambaran perilaku gegabah tidak taat aturan yang gemar merusak alam lingkungan, baik sadar maupun tidak (lihat lampiran ringkasan cerita rakyat *Terjadinya Sungai Kohoin di Teminabuan, Sorong*). Akan tetapi, kita tidak pernah memahami pesan-pesan dalam cerita rakyat seperti itu karena kita belum menempatkan sastra lisan sebagai bagian penting dalam hidup kita, terlebih dalam perencanaan dan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Akibatnya, kita malah menjadi "Salfale-Salfale", yang sering lalai bahkan dengan sengaja merusak alam lingkungan hidup kita demi alasan ekonomi dan teknologi.

Terjadinya banjir bandang di Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, pada 4 Oktober 2010, yang menghilangkan dan menewaskan ratusan jiwa serta menyengsarakan ribuan jiwa lainnya serta kerugian harta benda yang sangat besar, bisa jadi akibat ulah Salfale-Salfale, baik Salfale sebagai individu maupun Salfale sebagai pemegang hak pengelolaan hutan (HPH) Papua. Hak-hak pengelolaan hutan itu secara legal telah diberikan oleh pemerintah tanpa pertimbangan masyarakat, apalagi tanpa pemahaman terhadap pesan-pesan mulia dalam sastra lisan semacam *Terjadinya Sungai Kohoin di Teminabuan, Sorong*.

Cerita rakyat yang mengandung kearifan untuk menjaga lingkungan hidup dan hutan Papua tidak hanya terdapat dalam cerita rakyat Sorong. Kearifan-kearifan lokal semacam itu juga terdapat dalam banyak cerita rakyat di seluruh Papua. Oleh karena itu, cerita rakyat tersebut harus diteliti, digali, dan dieksplorasi sebagai sumber formulasi perencanaan dan pembangunan di Papua. Begitu pun kearifan masyarakat Sorong dan bencana banjir bandang di Wasior telah memberikan pelajaran berharga untuk kita agar mencintai dan memelihara alam lingkungan. Pemerintah dan masyarakat Papua harus aktif bertindak sehingga bencana seperti di Wasior tidak terulang lagi di Tanah Papua. Masyarakat harus terdorong untuk terus mengawasi pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan agar tidak terjerumus ke dalam sudut pandang yang kapitalis dan industrialis.

Ilustrasi di atas menggambarkan bahwa sastra bukanlah benda khayalan semata, melainkan karya yang mampu membawa perubahan universal; mendobrak kesewenang-wenangan kaum penguasa, serta memperbaiki kualitas kehidupan manusia di segala zaman. Pesan-pesan kemanusiaan dalam sastra seharusnya terus digali dan diimplementasikan sepanjang masa. Sastra, tidak niscaya pula, dapat digunakan untuk membangun akal budi manusia, terutama di era kemajuan teknologi sekarang yang cenderung berdampak buruk terhadap akhlak manusia.

Kegiatan penelitian terhadap kesastraan nasional dan daerah merupakan cara-cara normatif untuk mengimplementasikan peran kesastraan dalam pembangunan di Indonesia. Penelitian hendaknya ditindaklanjuti dengan langkah-langkah pendokumentasian, pengkajian, reproduksi, dan distribusi karya-karya kesastraan. Lebih dari itu, harus diupayakan agar aspek kesastraan menjadi bagian formulasi pembangunan bangsa sehingga ketika bangsa dan negara sudah berkembang, warga

bangsa tidak tercerabut dari akar-akar fundamental yang seharusnya berbasis pada nurani, akhlak, dan akal budi.

Penelitian terhadap sastra daerah masih mengalami ketimpangan dibandingkan dengan penelitian terhadap sastra nasional. Karya-karya sastra nasional yang diproduksi semua angkatan sudah pernah diteliti atau paling tidak dibahas dalam forum-forum ilmiah. Sebagian besar akademisi bidang sastra pun mengambil sastra nasional sebagai bahan kajian untuk memenuhi syarat-syarat akademisnya. Sebaliknya, penelitian terhadap sastra daerah masih jauh dari yang diharapkan, apalagi jika dibandingkan dengan jumlah sastra daerah senusantara yang belum terpetakan banyaknya.

Ratna (2006:360) mengatakan bahwa minat para peneliti, baik di kalangan akademisi maupun masyarakat pada umumnya, lebih banyak tertarik pada sastra modern. Kurangnya perhatian terhadap sastra lama jelas menghambat penyebaran aspek-aspek kebudayaan lokal yang terkandung di dalam sastra yang sesungguhnya sangat kaya dengan nilai-nilai. Perlu didekonstruksi, bahkan ditolak mitos yang mengatakan bahwa 'sastra lama sudah ketinggalan zaman'. Mitos tersebut harus diubah menjadi etos: 'sastra lama memicu kemajuan zaman'. Kemajuan negara barat pada dasarnya dibentuk atas dasar penghargaan yang sangat tinggi terhadap warisan klasik sebagaimana terkandung dalam sastra Yunani dan Romawi Kuno.

Memberikan perhatian terhadap sastra lama berarti membangkitkan kekuatan-kekuatan lokal bukan dalam pengertian negatif, misalnya, pertentangan etnis, agama, dan kelompok yang lain. Primordial, citra nostalgis, dan berbagai kerinduan masa lampau yang secara keseluruhan terkandung dalam sastra lama, perlu diperhatikan kembali.

Demikian halnya penelitian terhadap sastra lisan Papua masih sangat rendah kuantitas dan kualitasnya. Jika dibandingkan dengan penelitian bahasa-bahasa daerah di Papua, maka penelitian terhadap sastra (lisan) daerah Papua masih sangat sedikit. Hal itu disebabkan oleh kurangnya ilmuwan, pemerhati, dan minat masyarakat di bidang sastra lisan, serta tingginya biaya yang dibutuhkan untuk menjangkau tempat suku-suku asli pemangku sastra lisan Papua. Penelitian untuk inventarisasi dan dokumentasi cerita rakyat Papua pun masih terbilang sedikit jika dibandingkan dengan populasi ragam suku. Perbandingan jumlah itu akan jauh lebih mencolok jika dilihat dari aspek penelitian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang terkandung dalam cerita rakyat Papua.

Sehubungan dengan nilai budaya, Koentjaraningrat (2004:38-42) dengan memakai kerangka Clyde Kay Maben Kluckhohn (1905-1960), seorang antropolog berkebangsaan Amerika, telah merumuskan empat nilai budaya yang dianggap sebagai jiwa dan landasan pembangunan yang dikenal dengan kerangka MH-MK-MW-MA-MM, yaitu (1) nilai budaya (M)engenai (H)akikat dari hidup dan (M)anusia dengan (K)aryanya; (2) nilai budaya tentang persepsi manusia (M)engenai (W)aktu; (3) nilai budaya mengenai hakikat hubungan (M)anusia dengan (A)lam; dan (4) nilai budaya (M)engenai hubungan (M)anusia dengan sesamanya.

Nilai budaya (1) mengenai hakikat hidup dan manusia dengan karyanya ialah segala karya yang dihasilkan manusia harus bersumber dari suatu nilai budaya yang berorientasi terhadap hasil karya manusia itu sendiri (*achievement oriented*). Manusia

tidak hanya bekerja untuk menghasilkan suatu tanda prestasi atau simbol kebanggaan intelektual, melainkan untuk hakikat kualitas hidup yang berguna seluas-luasnya seluas makna dan tujuan kehidupan. Artinya, setiap karya manusia didedikasikan untuk penghargaan terhadap kehidupan dan manusia itu sendiri secara berkelanjutan, bukan untuk mencari nama, prestasi, atau prestise. Nilai budaya (2) tentang persepsi manusia mengenai waktu merupakan nilai budaya yang berorientasi ke masa depan yang membuat mentalitas manusia selalu kreatif dan inovatif; menghilangkan tabiat cengeng atas kejadian masa lalu (termasuk peninggalan leluhur) dengan melihat masa terkini sebagai kenyataan yang harus disikapi serta dihadapi dengan kuat dan berani. Nilai budaya yang berorientasi ke masa depan harus disertai dengan alat-alat pelapis yang dengan tepat guna dapat menangkal segala dampak negatif yang ditimbulkan oleh pembangunan. Nilai budaya (3) mengenai hakikat hubungan manusia dengan alam adalah kesadaran bahwa manusia hanya sebagai satu unsur kecil dalam sistem makrokosmos yang dikelilingi oleh masyarakat dan lingkungan alam semesta. Oleh karena itu, hidup harus selaras dengan alam lingkungan sebagaimana yang dipraktikkan oleh kaum petani dalam mengolah alam atau bumi untuk kelangsungan kehidupannya. Hasrat mengeksplorasi lingkungan alam harus mementingkan dan mengutamakan nilai yang tertinggal di alam daripada nilai yang dieksplorasi. Nilai budaya (4) mengenai hubungan manusia dengan sesamanya, Koentjaraningrat menyebut istilah 'sama rata sama rasa'. Manusia tidak pernah hidup sendiri dan tidak pernah berdiri sendiri, melainkan setiap saat memerlukan rasa aman dan juga interaksi sosial. Oleh karena itu, manusia selalu saling membutuhkan dengan berbagai konsekuensi kewajiban sehingga interaksi sosial dapat tetap terjaga. Nilai yang paling konkret dari hal ini adalah gotong-royong.

Sejak awal, pemikiran-pemikiran Koentjaraningrat telah memberi ruang inspirasi bagi pembangunan. Melihat dampak pembangunan saat ini yang melupakan pembangunan moral dan akhlak, maka formulasi sastra yang berlandaskan pada nilai-nilai budaya lokal dan nasional sudah saatnya untuk dirumuskan dan diterapkan secara konkret. Demikian halnya pembangunan di Papua, kini saatnya direncanakan dan dilaksanakan dengan menjadikan nilai lokalitas Papua sebagai pilar-pilar pembangunan, sebelum pembangunan Papua menjadi bumerang bagi masyarakatnya sendiri sebagaimana sudah menjadi beban dan bumerang pembangunan di daerah-daerah lain di Indonesia.

Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, terutama Bab XVI Pasal 58 telah memberi jaminan hukum untuk menjadikan lokalitas (bahasa dan sastra daerah Papua) sebagai landasan, sumber, atau alat pembangunan orang Papua dan daerahnya. Dalam Undang-Undang tersebut Pasal 58 Ayat (1) berbunyi, "Pemerintah provinsi berkewajiban membina, mengembangkan, dan melestarikan keragaman bahasa dan sastra daerah guna mempertahankan dan memantapkan jati diri orang Papua."<sup>21</sup> Ayat ini diperkuat dengan Ayat (3) yang berbunyi "Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di jenjang pendidikan dasar sesuai kebutuhan." Undang-Undang ini menjadi dasar hukum implementasi lokalitas dalam pembangunan Papua. Kedua ayat itu sekaligus merupakan dasar hukum yang kuat untuk menjadikan sastra lisan sebagai salah satu fundamental pembangunan di Papua.

#### 4. Simpulan

Beberapa simpulan yang dapat ditarik dari uraian di atas adalah sebagai berikut.

1. Pembangunan yang dilakukan oleh semua unsur di Papua harus memiliki moral yang tidak hanya mengejar pembangunan di bidang teknologi, melainkan juga pembangunan moral masyarakat di Papua, dengan menjadikan budaya lokal Papua sebagai pilar dan pengawal pembangunan. Untuk itu, kaum birokrat di pemerintahan harus melibatkan pemikiran unsur-unsur intelektual Papua untuk merumuskan landasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Papua.
2. Pemerintah di Papua harus menerapkan pola pembangunan yang berimbang antara pembangunan teknologi (fisik) dengan pembangunan moral masyarakat yang berbasis budaya lokalitas Papua, sebagai pelapis dan penapis dampak buruk dari pembangunan.
3. Unsur-unsur intelektual Papua harus berinisiatif merumuskan nilai-nilai budaya lokalitas Papua untuk dijadikan formula perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Papua, tanpa menunggu instruksi, imbauan, atau ajakan dari pemerintah terlebih dahulu. Formula yang dirumuskan kemudian diajukan menjadi hukum positif di Papua, semacam Perda dan sebagainya, yang menjadi dasar perencanaan sekaligus pengawal pelaksanaan pembangunan di tanah Papua.
4. Salah satu amanat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, khususnya Pasal 58 adalah menjadikan budaya lokal Papua, antara lain bahasa dan sastra daerah atau tradisi lisan Papua sebagai sumber formulasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Papua.
5. Sehubungan dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus Papua, pada Pasal 58, lokalitas Papua (sastra dan bahasa daerah serta tradisi lisan Papua) harus dimasukkan dalam sistem pendidikan dan pengajaran formal di Papua yang dibarengi dengan pembinaan tradisi lisan Papua dalam membentuk dan membangun kualitas moral masyarakat di Papua.

#### Daftar Pustaka

- Dharmojo. 2005. *Sistem Simbol dalam Munnaba Waropen Papua*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Held, G.J. 2006. *Waropen dalam Khasanah Budaya Papua* (Judul Asli: *The Papuas of Waropen* diterjemahkan oleh Dharmojo, M.Pd). Pasuruan: Pedati.
- Hutasuhut, Bokor. 1988. *Penakluk Ujung Dunia*. Jakarta: PT. Pustaka Karya Grafika Utama.
- Koentjaraningrat. 2004. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan* (Cetakan ke-21). Jakarta: Gramedia.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2006. *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra* (Cetakan Kedua). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rusli, Marah. 1929. *Sitti Nurhaya*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sekarningsih, Ani. 2000. *Namaku Teweraut – Sebuah Roman Antropologi dari Rimba-Rawa Asmat, Papua*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

## Lampiran

### Ringkasan cerita rakyat Sorong Selatan

#### “Terjadinya Sungai Kohoin di Teminabuan”

- (1) Sahman adalah seorang laki-laki yang hidup sebatang kara di Kampung Nahino dekat Teminabuan. Pada suatu sore ia sedang berdiang api karena keedinginan. Tiba-tiba dua makhluk manusia turun dari angkasa, laki-laki dan perempuan. Kedua makhluk itu ikut berdiang. Sebentar kemudian si perempuan kembali ke angkasa, sedangkan yang laki-laki tidak dapat kembali. Akhirnya, laki-laki itu diterima oleh Sahman tinggal di pondoknya dan mereka hidup seperti bersaudara.
- (2) Laki-laki angkasa itu ternyata sangat cerdas dan banyak membantu Sahman dalam kesulitan sehingga Sahman menamainya “Sarwanik” yang artinya pencetus gagasan. Sarwanik kemudian menikahi seorang perempuan di kampung itu. Sejak itu Sarwanik semakin dikenal di seluruh kampung dan memiliki banyak teman. Banyak warga kampung mendatangi Sarwanik meminta bantuannya untuk mengatasi berbagai kesulitan. Sarwanik pun dengan senang hati melayani dan memberi nasihat-nasihat berharga.
- (3) Pada suatu hari Sarwanik mengundang beberapa temannya bergotong-royong menganyam daun sagu untuk atap pondok. Hari sangat terik sehingga mereka kehausan. Mereka lalu mengatur seorang demi seorang dari mereka bergiliran mengambil air dari sebuah mata air di lambung perbukitan agak jauh dari tempat mereka bekerja. Sarwanik berpesan, apabila mengambil air itu, haruslah sabar dan hati-hati. Rumputan dan dedaunan yang tumbuh bahkan terapung di kolam mata air dan di sekitar tanggulnya tidak boleh diusik apalagi dicabuti, sebab mata air itu tabu. Orang tidak boleh berlaku sembarangan.
- (4) Ketika giliran temannya, bernama Salfale, mengambil air, ia lupa nasihat Sarwanik. Ia menyingkahkan dedaunan yang mengapung di air. Rumputan yang tumbuh merambat di dalam air dan di sekitar mata air itu pun dicabutnya karena menghalanginya untuk mandi. Salfale kemudian mandi dengan menenggelamkan badannya ke dalam air. Setelah puas mandi, Salfale kembali ke tempat bekerja membawa bumbung bambu berisi air penuh.
- (5) Ketika mereka sedang bekerja, tiba-tiba terdengarlah bunyi deru dari arah sumber mata air. Itulan deru air banjir yang mengalir deras dari arah perbukitan, menumbangkan dan menghanyutkan semua pepohonan yang dilaluinya. Tidak luput manusia, rumah, hewan-hewan, dan harta benda lainnya turut dihanyutkan banjir sampai ke laut. Banyak penduduk dan hewan yang mati sia-sia dibinasakan oleh banjir. Karena Sarwanik dan teman-temannya saat itu bekerja di atas bukit maka mereka selamat dari terjangan air deras itu.
- (6) Konon, sampai sekarang air deras itu masih terus mengalir dan itulah Sungai Kohoin yang terdapat di Teminabuan di Kabupaten Sorong Selatan.